

Judul : SDA Dikelola Secara Adil, Konflik Di Papua Bakal Cepat Beres
Tanggal : Rabu, 11 Mei 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

SDA Dikelola Secara Adil Konflik Di Papua Bakal Cepat Beres



Robert J Kardinal

ANGGOTA Komisi X DPR Robert J Kardinal menilai, konflik yang terjadi di berbagai wilayah Papua seperti di Kabupaten Intan Jaya, akibat sistem pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang kurang berkeadilan.

Diusulkan, pengelolaan tambang di tanah Papua bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Papua, utamanya di sekitar tambang.

"Kalau perlu, mayoritas saham di kawasan tambang seperti Blok Wabu dikuasai Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berilah mereka kepercayaan, sehingga mereka sendiri yang mencari investor," kata Robert di Jakarta, kemarin.

Robert menuturkan, masyarakat Papua khususnya di sekitar kawasan Blok Wabu khawatir kekayaan tambang yang ada di sana akan menjadi sumber konflik antara masyarakat lokal, aparat dan tentara Operasi Papua Merdeka (OPM).

Ini juga sebagai akumulasi dari kekecewaan masyarakat Papua terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) yang selama 56 tahun beroperasi gagal mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.

Yang terjadi saat ini, lanjut eks Bendahara Umum DPP Golkar ini, kekayaan alam Papua yang melimpah malah membuat kehidupan masyarakat makin mencekam. Sebab, dampak pengelolaan tambang yang terjadi telah membuat kerusakan lingkungan makin berat.

Intensitas penambangan ilegal juga makin besar lantaran makin banyak orang dari luar melakukan aktivitas penambangan ilegal. Ketegangan antara warga lokal, pendatang, dan aparat TNI-Polri juga makin tinggi. "Akhirnya orang Papua yang kecewa minta merdeka," ujarnya.

Politisi asal Papua Barat ini juga melihat sumber daya manusia orang Papua kurang dioptimalkan. Buktinya, sampai saat ini belum ada satu pun orang asli Papua yang menempati posisi Presiden Direktur (Presdir).

"Dan infonya, orang Papua yang dapat jabatan di situ, ya hanya buat bunga-bunga saja. Tidak punya kuasa apa-apa dalam mengambil keputusan," ungkapnya.

Dari pengalaman ini, masyarakat Papua benar-benar ingin mengimplementasikan ajaran Proklamator Soekarno dalam kehidupan di sana. Mereka ingin semua kekayaan alam bisa dikelola sendiri.

"Mereka ingin berdikari. Dalam arti, kekayaan alam dikelola sendiri oleh anak cucu mereka," katanya.

Sebelumnya, tokoh Masyarakat adat Intan Jaya, Bartolomeus Mirip menyatakan penolakan terhadap kegiatan eksplorasi tambang di Blok Wabu.

Penolakan ini lantaran warga menganggap sumber konflik di sana adalah aktivitas pertambangan di Blok Wabu yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia melalui anak perusahaannya. ■ KAL